

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk di Kota terus meningkat dari setiap tahunnya. Sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk tentu juga meningkatnya aktivitas dan juga pola konsumsi masyarakat. Setiap aktivitas yang masyarakat akan selalu menghasilkan sampah atau limbah. Sampah yang jika tidak ditangani dengan serius dan saksama, tentu dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang pesat tentu mempengaruhi banyaknya timbulan yang disebabkan oleh sampah terus meningkat. Yang menyebabkan dibutuhkan sampah yang dikelola efektif dan optimal sangat diperlukan agar masalah sampah tidak merusak lingkungan serta menurunkan kualitas kesehatan masyarakat menurut Wibowo (2013).¹

Sampah merupakan limbah yang sifatnya padat atau setengah padat yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan serta proses kehidupan manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sampah di perkotaan dapat bersumber dari hasil sampingan proses kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Penyumbang dan penghasil sampah (limbah padat) perkotaan lainnya dihasilkan pada area perumahan, area perdagangan maupun pusat perbelanjaan, area perkantoran, wilayah pabrik, peternakan hewan, serta berbagai fasilitas sarana dan prasarana umum lainnya menurut Anwar (2016).¹

Permasalahan sampah merupakan isu yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Seperti tantangan utama yang berhubungan dengan sampah di Indonesia yaitu kepedulian dan perilaku masyarakat dalam mengelola persampahan. Maka dari itu untuk mengurangi serta mengatasi masalah yang di timbulkan oleh sampah, diperlukan sistem pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang efektif sangat diperlukan agar permasalahan sampah ini dapat diatasi.²

Berdasarkan data yang bersumber dari statistika, pada tahun 2023 menyatakan bahwa timbulan sampah terus bertambah dalam jumlah besar selama beberapa dekade belakangan, masalah sampah terus berkembang diseluruh dunia dan tidak ada mengindikasikan tanda-tanda penurunan. Pada tahun 2050, jumlah sampah perkotaan secara global akan diperkirakan bertambah sekitar 75 persen, mencapai 3,8 miliar metrik ton³. Sampah secara global yang tidak ditangani dengan baik sekitar 33 persen.⁴

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 hasil input dari 365 kab/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional hingga berada pada angka 38,6 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 62,2% (24 juta ton) bisa dikelola, sementara sisanya 37,8% (14,6 juta ton) sampah tidak dikelola. Sumber sampah berasal dari 50,78% sampah rumah tangga, 14,77% perniagaan, 12,19% pasar, 8,14% kawasan komersial, 5,24% fasilitas publik, 6,03 % kantor, 7,5% jalan dan 2,85% lainnya.⁵

Timbulan di Provinsi Jambi sendiri, memiliki timbulan sampah harian sebanyak 799.63 ton, sedangkan untuk timbulan sampah tahunan sebanyak 291,863.27 ton. Timbulan sampah di Provinsi Jambi ini berasal dari 2 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Bungo dan Tebo serta Kota Sungai Penuh dan Jambi. Timbulan sampah tahunan di dominasi paling banyak berasal dari Kota Jambi 161,897.58 ton, lalu Kabupaten Bungo sebanyak 59,014.11 ton, Kabupaten Tebo 52,546.28 ton, dan yang terakhir Kota Sungai Penuh yaitu 18,405.31 ton.⁵

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi jumlah Penduduk di Kota Jambi tahun 2023 merupakan penduduk terbanyak di Provinsi Jambi yaitu 627,8 ribu jiwa, dengan luas wilayah 169,89 km². Peningkatan jumlah penduduk di Kota Jambi menyebabkan volume sampah semakin bertambah. Di sebabkan juga, pola konsumsi masyarakat yang berperan dalam menciptakan berbagai macam sampah, misalnya pembungkus sampah yang berbahaya yang sulit terurai oleh alam. Hingga saat ini,

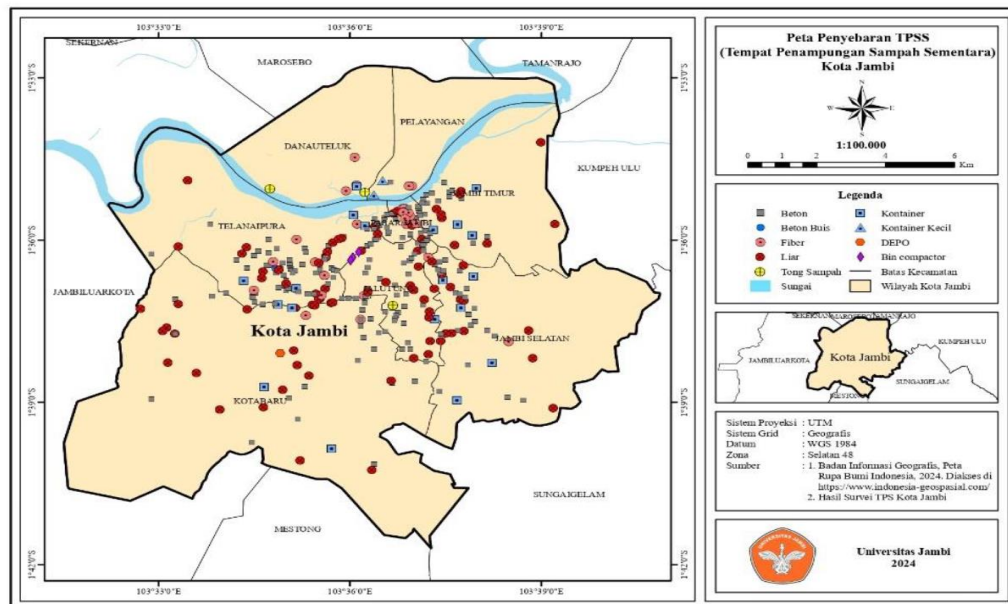
mayoritas masyarakat selalu menganggap sampah sebagai suatu benda yang tidak bermanfaat, bukan sebagai sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan.⁶

Kota Jambi menghasilkan 443,56 juta ton sampah perharinya dengan komposisi berdasarkan jenis sampah, sebanyak 36,66% sisa makanan, 21,31% kayu/ranting, 18,99% plastik, 9,44% kertas/karton dan lain-lain. Banyaknya sampah yang dihasilkan Kota Jambi tentu mempengaruhi sebaran tempat penampungan sementara (TPS).⁵

Menurut dari Peraturan Menteri Pekerjaan umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) merupakan lokasi dimana sampah sebelum diangkut untuk dilakukan pendauran ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan akhir. Sementara itu Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses serta mengembalikan sampah ke media lingkungan.⁷

Tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang cukup dan layak sangat penting untuk menampung sampah. Tanpa fasilitas tersebut, suatu wilayah bisa menghadapi masalah besar. Jika masalah sampah penanganannya tidak serius dan kurang optimal, dikhawatirkan daerah tersebut akan terperangkap dalam tumpukan sampah yang terus menumpuk, disertai dengan berbagai macam pencemaran air, udara dan tanah dapat menjadi dampak negatif yang ditimbulkan, serta penyebaran penyakit.⁸ Penampungan sampah yang tidak pada tempatnya atau tanpa fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah memunculkan adanya Tempat Penampungan Sampah (TPS) ilegal.⁹

Dengan peta lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Jambi di bawah ini:

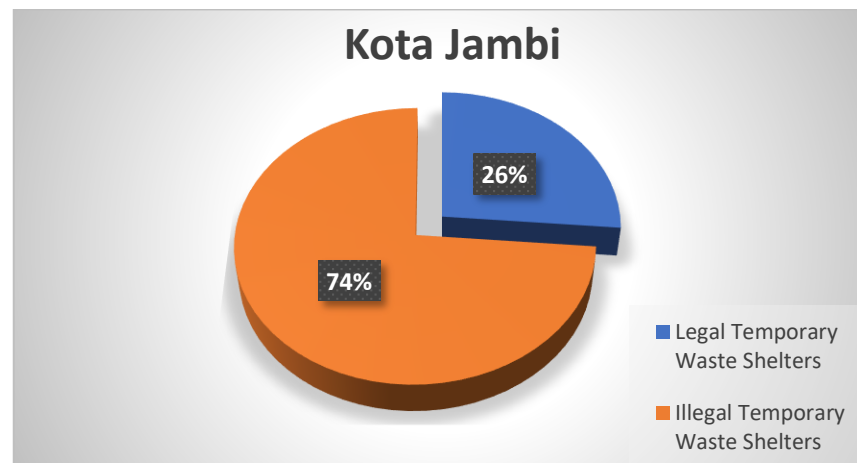


Gambar 1. 1 Peta Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Jambi Tahun 2024

Sumber : Artikel Pemetaan dan Analisis Tempat Penampungan Sampah Sementara di Provinsi Jambi

Berdasarkan peta sebaran lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kota Jambi menunjukkan bahwa terdapat tempat penampungan sampah sementara sebanyak 342 titik, diantaranya sebanyak 90 merupakan tempat penampungan sampah sementara ilegal dan sebanyak 252 merupakan tempat penampungan sampah sementara legal.¹⁰

Dengan persentase Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) legal dan ilegal di Kota Jambi yaitu seperti yang terdapat pada diagram lingkaran sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Diagram Persentase TPSS Legal dan TPSS Ilegal di Kota Jambi Tahun 2024

Sumber : Artikel Pemetaan dan Analisis Tempat Penampungan Sampah Sementara di Provinsi Jambi

Berdasarkan dari gambar diagram lingkaran diatas, sebaran TPS legal di Kota Jambi memiliki presentase 26% yang jauh lebih kecil dari presentase ilegal yaitu 74%¹⁰. Akibat pembuangan sampah pada area yang tidak sesuai tempatnya tentu bisa mengakibatkan dampak buruk yang serius bagi lingkungan, khususnya area lokasi pembuangan sampah ilegal. Saat proses pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik seringkali menyebabkan pencemaran lingkungan tanah dan air. Di samping itu, pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan buruknya keindahan penataan lingkungan, muncul bau yang tidak sedap, serta dampak negatif terhadap kesehatan. Hal ini juga tentu saja merusak kelangsungan fungsi lingkungan (Rochman, dkk. 2012).⁹

Pengelolaan persampahan Kota Jambi diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup peraturan bupati Nomor No 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengelola 4 unit transfer depo dan sebanyak 382 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi pada 8 Kecamatan.¹¹

Maka dari itu perlu pengelolaan sampah yang baik dengan manajemen pengelolaan sampah tersebut. *George R. Terry* menyatakan

bahwa “*management is the accomplishing of a predeternined ojectives through the efforts of other people*” dalam karyanya “*Principles of Management*” Sukarna (2011), yang berarti manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melibatkan serta dapat berkolaborasi dengan pihak lain.¹²

Pengelolaan lingkungan hidup adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sektor dan memerlukan pengembangan sistem yang terintegrasi sebagai karakteristik utamanya. Pada tingkat daerah, pelaksanaan pengelolaan ini mengikutsertakan berbagai instansi, perguruan tinggi, sektor swasta, serta masyarakat. Tugas ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena membutuhkan koordinasi yang solid serta pengelolaan yang seimbang untuk memastikan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.¹³

Hasil penelitian Fadzoli Toif dkk (2023) mengatakan bahwa beberapa faktor penghambat dari implementasi pengelolaan sampah di Indonesia antara lain pendanaan yang terbatas untuk pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, serta banyaknya jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) belum sesuai dengan standar dalam pengeolahan sampah. Karena kebutuhan yang cukup besar, anggaran pengelolaan sampah masih dianggap kurang, terhitung dari penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai dengan alokasi anggaran terkhususnya daerah-daerah di Indonesia, yang kebutuhannya juga belum dapat mencakup sepenuhnya.¹⁴

Berdasarkan penelitian Terra Hakim A (2022) menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat Kota Jambi terhadap saat membuang sampah, menyebabkan jadwal pembuangan sampah yang seharusnya dilakukan pada pukul 18.00 WIB, seringkali tidak ditaati. Akibatnya, meskipun sampah dari TPS sudah diangkut, sampah baru terus muncul sehingga kota tetap terlihat tidak bersih¹¹. Sejalan dengan hasil penelitian Rahmi Febrianti dkk (2022), kepedulian masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan pentingnya membuang sampah tepat pada waktunya, baik itu pada pagi maupun siang hari saat jadwal pengangkutannya. Selain itu,

permasalahan ketidakmauan masyarakat untuk menjadikan area sekitar lingkungan mereka sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) karena kekhawatiran terhadap bau yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar.¹⁵

Sejalan dengan penelitian Rina Fauziah dan Suparmi (2022) yang sama di Kota Jambi yaitu kendaraan pengangkutan sampah di Kota Jambi tergolong buruk, dengan presentase 26% dikarenakan masih ada kendaraan yang tidak dilengkapi penutup sampah dan bak kendaraan yang masih bocor. Proses pengangkutan sampah dinilai kurang memadai, dengan presentase 75% karena banyak petugas pengangkut yang tidak menggunakan penutup sampah dan kendaraan dalam keadaan bocor, yang mengakibatkan air lindi berceceran saat pengangkutan menuju TPA. Kondisi sampah pada TPS pun tidak memadai dengan presentase 100%, dikarenakan banyaknya sampah yang tercecer di area luar TPS, akibat dari masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dengan cara di lempar ketika membuang sampah.¹⁶

Dukungan masyarakat terhadap Perda No. 5 Tahun 2020 terkait penerapan program 3R kurang direspon dan juga rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala pada penelitian Dinata A (2023). Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya dengan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah serta pendampingan untuk TPS 3R di Kota Jambi. Selain Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Telanaipura juga telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, namun masalah sampah dan lingkungan dianggap oleh masyarakat sepenuhnya merupakan hanya tanggung jawab pemerintah.¹⁷

Hasil penelitian Amal M dkk (2023), sebaran dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kecamatan Tembalang masih belum mencakup seluruh wilayah pemukiman, karena beberapa kawasan tidak terjangkau oleh layanan TPS yang ada. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah TPS di Kecamatan Tembalang, yang hanya berjumlah 26 unit, sementara luas Kecamatan Tembalang mencapai 4050,732 ha¹⁸. Sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Efendi (2023) berdasarkan hasil Pengamatan di lapangan, teridentifikasi 17 titik lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

ilegal yang memenuhi kriteria dan tersebar di Desa Gerisak Semenggelen. Keberadaan TPS ilegal ini menjadi masalah yang serius yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta estetika sekitar lingkungan tersebut. Disebabkan dari beragam hal, seperti terbatasnya akses ke tempat pembuangan sampah yang resmi hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah tersebut.¹⁹

Peningkatan volume sampah yang tidak teratur dapat menyebabkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan juga Tempat Penampungan Akhir (TPA) mencapai kapasitas maksimal serta bahkan dapat beban yang berlebih. Masalah sampah semakin kompleks, dan tantangan dalam pengelolaannya semakin besar. Salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian adalah kapasitas dari tempat penampungan sementara (TPS).¹⁸

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi oleh tenaga kerja pada bagian Bidang Pengelolaan Sampah didapatkan permasalahan bahwasannya, membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan kebiasaan buruk dari masyarakat, membuang tidak tepat pada waktunya dan membuang sampah melebihi kapasitas. Sampah yang berserakan di luar dari area Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersedia menjadi bukti masih banyak masyarakat yang rendah kesadarannya, pada pinggir parit, pinggir jalan serta ditemukan ada TPS liar di lokasi tempat penampungan sampah sementara yang berstatus ilegal. Serta angkutan atau truk pengangkut sampah yang kurang memadai dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA.

Berdasarkan dari berbagai macam permasalahan pada survei awal di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen tempat penampungan sampah sementara masih menghadapi kendala yang dikarenakan, pada tahap perencanaan yaitu kurangnya perencanaan strategis terhadap pengelolaan TPS ini dengan masih banyaknya ditemukan TPS Ilegal. Kurangnya sumber daya masih banyak TPS menghadapi masalah kekurangan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja, sarana dan prasarana, yang menghambat

pelaksanaan rencana serta kurangnya pelatihan bagi petugas pengelola TPS. Pada tahap pengecekan, sering terjadi kerusakan teknis ringan pada kendaraan armada serta petugas yang tidak lengkap dalam menggunakan APD saat melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sebelum dibuang ke TPS turut menjadi faktor yang menghambat.

Oleh karena itu diperlukan analisis manajemen sampah dengan menggunakan pendekatan sistem *Plan, Do, Check and Act*. Dengan analisis manajemen sampah ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna ketika merencanakan program pengelolaan tempat pembuangan sampah untuk kedepannya. Dengan demikian, peneliti ingin untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Manajemen Pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Jambi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari tingginya jumlah timbulan sampah di Kota jambi sehingga mempengaruhi sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS). Seperti permasalahan, membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan kebiasaan buruk dari masyarakat, membuang tidak tepat pada waktunya dan membuang sampah melebihi kapasitas. Sampah yang berserakan di luar dari area Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersedia menjadi bukti masih banyak masyarakat yang rendah kesadarannya.

Sehingga perlunya mengetahui bagaimana mekanisme manajemen pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kota Jambi yang sesuai dengan Analisis manajemen PDCA. *Plan* (Rencanakan), *Do* (Laksanakan), *Check* (Pemeriksaan), *Act* (Tindakan).

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Analisis Manajemen PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) Pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara Kota Jambi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis perencanaan tempat penampungan sampah sementara di Kota Jambi
2. Untuk menganalisis pelaksanaan tempat penampungan sampah sementara di Kota Jambi
3. Untuk menganalisis pemeriksaan tempat penampungan sampah sementara di Kota Jambi.
4. Untuk menganalisis tindakan tempat penampungan sampah sementara di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk referensi dan juga saran guna untuk mengevaluasi dalam mengurangi permasalahan sampah serta memperbaiki nilai estetika lingkungan bagi Dinas Lingkungan Hidup terkhususnya di Kota Jambi.

1.4.2 Manfaat bagi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini, bisa bermanfaat sebagai bahan bacaan serta sumber informasi, maupun dapat menjadi referensi ketika mahasiswa dalam melakukan penelitian berikutnya, serta dasar untuk evaluasi dan perbaikan program di institusi.

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan pengaplikasian terhadap teori-teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan.

1.4.4 Manfaat bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya akan pengelolaan sampah pada tempat penampungan sementara (TPS).